

BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan beberapa kesimpulan yakni:

1. Pengaruh kerja sama industri pertahanan dengan PDB memiliki koefisien parameter sebesar 0,330. Dengan nilai *T-statistics* 2,041 dan *P-values* 0,041, maka kerja sama industri pertahanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB dengan indikator paling dominan pada kerja sama industri, yakni indikator kebijakan, sementara pada PDB, yaitu belanja pertahanan.
2. Pengaruh kemandirian industri pertahanan dengan PDB memiliki koefisien parameter sebesar 0,498. Dengan nilai *T-statistics* 2,715 dan *P-values* 0,007, maka kemandirian industri pertahanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB. Adapun Indikator paling dominan dalam kemandirian pada indikator penguasaan teknologi, sementara pada PDB tetap pada indikator belanja pertahanan.
3. Pengaruh kerja sama industri pertahanan dan kemandirian industri pertahanan secara simultan terhadap PDB memiliki koefisien determinasi sebesar 0,547. Dengan nilai *F-statistics* 16,229 dan *P-values* -nya 0, maka kerja sama dan kemandirian industri pertahanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB.
4. Pengaruh kerja sama industri pertahanan dengan pertahanan negara memiliki koefisien parameter sebesar -0,107. Dengan nilai *T-statistics* 0,780 dan *P-values* 0,435, hasilnya kerja sama industri pertahanan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertahanan negara. Dengan indikator paling dominan pada kerja sama, yakni kebijakan sedangkan indikator submisifnya adalah teknis kerja sama, sementara pada pertahanan negara, yaitu

kekuatan nasional. Sementara jika melalui PDB, hasil uji menunjukkan kerja sama berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertahanan negara dengan koefisien parameter 0,253, nilai *T-statistics* 1,622, dan *P-values* 0,105.

5. Pengaruh kemandirian industri pertahanan dengan pertahanan negara memiliki koefisien parameter sebesar 0,232. Dengan nilai *T-statistics* 1,393 dan *P-values* 0,164, hasilnya kemandirian industri pertahanan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertahanan negara. Adapun indikator dominan pada kemandirian, yakni penguasaan teknologi, sementara pertahanan negara tetap pada kekuatan nasional. Sementara jika melalui PDB, hasil uji menunjukkan kemandirian berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertahanan negara dengan koefisien parameter 0,382, nilai *T-statistics* 2,321, dan *P-values* 0,020.
6. Pengaruh PDB dengan pertahanan negara memiliki koefisien parameter sebesar 0,766. Dengan *T-statistics* 4,890 dan *P-values*-nya 0, maka PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertahanan negara. Dengan indikator paling dominan dari PDB, yakni indikator belanja pertahanan, sedangkan pertahanan negara tetap pada indikator kekuatan nasional.
7. Pengaruh kerja sama, kemandirian, dan PDB secara simultan dengan pertahanan negara memiliki koefisien determinasi sebesar 0,767. Dengan nilai *F-statistics* 28,510 dan *P-values*-nya 0, hasilnya kerja sama, kemandirian, dan PDB secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap pertahanan negara. Besarnya pengaruh ketiga variabel terhadap pertahanan negara berkontribusi sebesar 76,70%. Hal ini berarti bahwa variabel kerja sama, kemandirian, dan PDB mampu menjelaskan tingkat pertahanan negara sebesar 76,70%, sementara sisanya 23,30% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya. Adapun indikator-indikatornya adalah indikator kebijakan pada kerja sama, penguasaan teknologi pada kemandirian industri pertahanan, indikator belanja pertahanan pada PDB, dan pada pertahanan negara indikator dominan adalah kekuatan nasional. Penelitian ini menghasilkan

sebuah model kerja sama dan kemandirian industri pertahanan untuk meningkatkan pertahanan negara dapat melalui peningkatan PDB.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Rekomendasi Akademis

Kerja sama dan kemandirian industri pertahanan dalam mendukung PDB guna pertahanan negara memerlukan dukungan seluruh *stakeholder*, beberapa diantaranya merupakan *stakeholder* strategis, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, Komisi I DPR RI, Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Defend ID. Sebagai sebuah penelitian, tentunya penelitian ini dapat diperluas dengan penambahan variabel lainnya maupun lokus penelitiannya. Oleh karena itu, berikut merupakan rekomendasi akademis yang dihasilkan dalam penelitian ini:

1. Kajian akademis untuk optimalnya kerja sama dan kemandirian industri pertahanan untuk mendukung PDB guna pertahanan negara perlu senantiasa ditingkatkan. Meskipun secara hasil strategi pada analisis SWOT menunjukkan pada kuadran I, tetapi angkanya masih relatif kecil. Terlebih dalam variabel kerja sama ada satu hasil yang negatif, yakni kerja sama terhadap pertahanan secara langsung. Hal tersebut memerlukan kajian lebih lanjut dan mendalam.
2. Sebagai bahan referensi dan rujukan ilmiah dalam pengembangan ilmu pertahanan khususnya yang berkaitan dengan ekonomi pertahanan dan manajemen industri pertahanan.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Pertahanan negara merupakan sebuah hal yang esensial untuk terus dicapai dan dilakukan peningkatan. Industri pertahanan adalah salah satu sektor yang cukup strategis dalam upaya tersebut. Sebagai negara dengan kemampuan pertahanan yang cukup baik Indonesia perlu terus

meningkatkan kapasitas industri pertahanannya melalui suatu kerja sama dan kemandirian industri pertahanan. karena dengan kemandirian , tidak hanya *output* berupa kuatnya pertahanan negara juga akan mendatangkan dampak ekonomi melalui PDB. Maka, guna memastikan hal-hal tersebut, berikut merupakan rekomendasi yang dapat dijalankan:

1. Mengoptimalkan perumusan kebijakan oleh DPR RI dan Kementerian Pertahanan serta industri pertahanan pada setiap kerja sama industri pertahanan yang dilaksanakan. Langkah tersebut dimulai dengan mencermati pengarusutamaan kebijakan secara *bottom-up* melibatkan mitra strategis agar secara komprehensif mampu menghasilkan kerja sama yang efektif dan berdampak bagi kemandirian, mendukung PDB, guna pertahanan negara. Selain itu pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian Pertahanan, KKIP, DPR RI beserta Defend Id perlu berkoordinasi secara aktif untuk mensukseskan kebijakan yang telah dirumuskan sekaligus mengevaluasi program-program yang telah dijalankan terkait kebijakan tersebut.
2. Memprioritaskan upaya pencapaian kemandirian industri pertahanan melalui peningkatan dalam kemampuan material transfer kemampuan *capacity transfer* pada kerja sama yang telah dilakukan. Maka, institusi seperti KKIP dan industri-industri pertahanan perlu meningkatkan kemampuan MRO, komitmen pelaksanaan TKDN, dan adanya sebuah *road map* anggaran hingga tercapainya kemandirian. Hal tersebut juga tidak terlepas dari peran DPR RI melalui pembentukan regulasi guna mendukung penyelenggaraan industri pertahanan ke arah kemandirian.
3. PDB sebagai bagian penting dalam terbentuknya anggaran pertahanan juga perlu menjadi perhatian Kementerian Perindustrian, Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan serta sinergitas dengan Defend Id serta kolaborasi aktif dengan industri pertahanan swasta. Maka, akan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selanjutnya tingkat

anggaran pertahanan negara menguat. Hal lainnya yang juga penting untuk dilaksanakan adalah peningkatan aktivitas ekspor Alpalhankam, sehingga semakin efisiennya aktivitas impor.